

Pengaruh Korupsi, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

Rado Sujidno*, Ratu Eva Febriani

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia;

Kata Kunci

Kata kunci: ASEAN, CPI, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Data Panel.

Abstrak

Penelitian ini ingin menganalisis tentang korupsi, pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar (M2) dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah data panel. Jumlah data cross-section adalah 7 negara dan data-series adalah sembilan tahun. Model terbaik diperoleh dari redundant fixed effect, Correlated random effects-Hausman test, and technical consideration. Model yang terpilih adalah fixed-effect model. Berdasarkan output regresi, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Sehingga, pengeluaran pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Sedangkan variable lain seperti korupsi dan jumlah uang beredar (M2) tidak signifikan. Artinya, korupsi dan jumlah uang beredar (M2) tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Keywords

Keywords: ASEAN, CPI, Economic Growth, Government Spending, Panel Data.

Abstract

The researchers want to analysis about Corruption, government spending, money supply (M2), and economic growth. The method of analysis use panel data. The number of cross-section data is 7 countries and time-series data are nine years. The best model was obtained from redundant fixed effect, Correlated random effects-Hausman test, and technical consideration. The selected model is the fixed-effect model. Based on regression output, government spending has a significant negative effect on economic growth in ASEAN. So, government spending can hamper economic growth in ASEAN. While; other variables such as Corruption and money supply (M2) are not significant. Meaning, that Corruption and money supply (M2) do not affect the economic growth in ASEAN.

*Corresponding Author: **Rado Sujidno**, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia;
Email: soejidno125@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.202>

History Artikel:

Received: 16 Januari 2023 | Accepted: 30 Juni 2023

PENDAHULUAN

Kawasan ASEAN merupakan suatu kawasan di Asia yang memiliki potensi menjadi suatu kawasan pasar dunia yang baru. Mengingat pada tahun 2015, telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menandakan bahwa pada saat itu semua negara anggota ASEAN dapat menjual barang atau jasa ke negara lain dengan

mudah. Hal ini sejalan dengan tujuan diberlakukannya MEA itu sendiri, yaitu untuk menjadikan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas (Septiana, 2019). Sehingga dilain hal, dengan diberlakukannya MEA secara tidak langsung dapat mempercepat ter-realisasinya salah

satu tujuan dibentuknya ASEAN itu sendiri yaitu melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada kemajuan dibidang sosial.

Pembangunan dalam arti luas pada dasarnya tetap dengan akselerasi pertumbuhan dalam suatu perekonomian, kemiskinan dalam hal pengentasannya, dan pendapatan dalam hal ketimpangan pendapatan itu sendiri. Lebih dari hal tersebut, pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam berbagai dimensi yang mencakup perubahan-perubahan yang didasari oleh sebuah struktur sosial, sikap masyarakat, dan berbagai institusi nasional. Dalam mengukur kemajuan pembangunan, ada beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai indikator salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi mengukur kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara untuk memperbesar outputnya dengan kemajuan yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk (Todaro dalam Yudistira dan Jember, 2015).

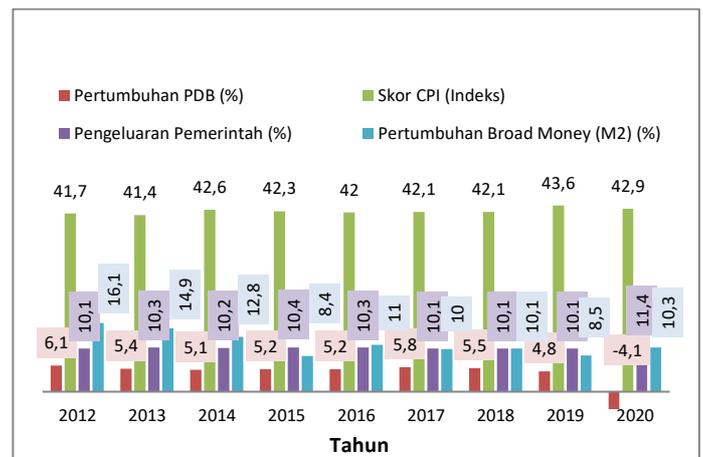
Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses yang merubah kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju kearah yang lebih baik selama kurun waktu tertentu. Selain itu juga, pertumbuhan ekonomi dapat disebut sebagai suatu proses dalam hal kenaikan kapasitas produksi sebuah perekonomian yang perwujudannya dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Anggeraini, 2012).

Menurut Bank Dunia, korupsi merupakan satu diantara beberapa faktor lain yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh luasnya cakupan kegiatan korupsi dan sifatnya yang sangat rahasia. Peraturan perundang-undangan mengenai isu kebijakan publik yang terkait dengan pemberantasan korupsi merupakan tantangan ke depan (Sahayan & Stieger, 2014).

Korupsi merupakan suatu fenomena yang sangat sering dijumpai diberbagai negara. Baik itu negara berkembang, negara miskin, maupun negara maju tidak seutuhnya bisa terlepas dari masalah korupsi, akan tetapi ada beberapa faktor pembeda diantara keduanya yaitu terletak pada potensi, potensi terjadinya korupsi di negara maju tidak sama dengan potensi korupsi di negara yang sedang berkembang. Dimana potensi dilakukannya korupsi di negara maju cenderung rendah jika dibandingkan dengan potensi praktik korupsi di negara berkembang yang lebih tinggi (Akman & Sapha, 2018). Sasana dalam Ichvani dan Sasana (2019) menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan otoriter yang ada disuatu negara sangat berkaitan erat dengan korupsi yang banyak terjadi di negara sedang berkembang dan negara miskin. Pada awal

reformasi, tingkat korupsi negara-negara di dunia termasuk dalam hal ini adalah Asia Tenggara telah berkembang, skalanya meningkat dan semakin terdiversifikasi (Campos & Pradnan dalam Thach dkk, 2017).

Tabel 5. Pertumbuhan PDB, Skor CPI, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Broad Money (M2) di 7 Negara Anggota ASEAN (2012-2020)



Sumber: Worldbank dan Transparency International (2022).

Jika dilihat dari Grafik 1 korupsi di 7 negara anggota ASEAN sepanjang tahun 2012-2020 masih tinggi, dimana rata-rata skor CPI setiap tahunnya berada di bawah 45. Suatu negara dikatakan bersih dari korupsi jika skor CPI 100 (Transparency International, 2021). Hal ini berarti dari 7 negara anggota ASEAN secara keseluruhan susah untuk lepas dari jeratan korupsi yang sudah mengakar. Tahun 2020, skor CPI 7 negara anggota ASEAN mencapai 43.6 dengan pertumbuhan PDB sebesar -4.1% yang berbanding terbalik dengan tahun 2013, dimana pada tahun 2013 skor CPI hanya 41.4 dengan pertumbuhan PDB mencapai 5.4%. Hal ini kontradiksi terhadap teori yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan beberapa studi empiris, secara umum justru korupsi dinilai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu negara secara negatif. Lutfi dkk (2020), menerangkan bahwa secara tidak langsung korupsi berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi, yang mana dampak negatif korupsi dalam hal ini lebih mengarah ke misalokasi sumber daya dan inefisiensi proses produksi. Nawatmi (2016) berpendapat bahwa korupsi bukan menjadi *Grease of Wheel* yang dalam artian bahwa korupsi bukanlah pelicin bagi perekonomian.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah merupakan faktor lainnya yang berperan penting terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah adalah

komponen dalam menyusun Produk Domestik Bruto (PDB), bersamaan dengan konsumsi masyarakat, investasi, dan net-ekspor.

Grafik 1 menunjukkan rata-rata pengeluaran pemerintah di 7 negara anggota ASEAN secara umum sepanjang tahun 2012-2020 berada dibawah 11%. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, rata-rata pertumbuhan PDB yang terjadi di tahun 2020 dengan pengeluaran pemerintah yang tinggi atau diatas 11% yaitu sebesar 11.4% justru pertumbuhan PDB nya -4.1%, sebaliknya tahun dimana pengeluaran pemerintah rendah seperti tahun 2012 (10.1%) justru pertumbuhan PDB berada sebesar 6.1%. Hal ini berlawanan dengan Wu (2010), yang menerangkan bahwa hubungan belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sangatlah erat dimana belanja pemerintah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Faktor lain dalam suatu perekonomian yang sangat penting untuk diperhatikan adalah Jumlah Uang Beredar (M2) atau *broad money*. *Broad money* (M2) dan *narrow money* (M1) memberikan gambaran kondisi likuiditas bagi perekonomian. Dalam proses dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan indikator tingkat likuiditas yang akan memberikan arah kegiatan, serta cara mengatur efektifitas kegiatan ekonomi untuk menentukan besarnya jumlah uang beredar. Ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan jumlah output dipasar dapat mengganggu kestabilan perekonomian. Jika terlalu banyak jumlah uang beredar akan mengakibatkan inflasi dan sebaliknya jika jumlah uang beredar terlalu sedikit akan mengakibatkan resesi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara (Utami dan Suryaningsih, 2011).

Pada Grafik 1 dapat dilihat pertumbuhan *broad money* (M2) tahun 2020 sebesar 10.3% tapi dengan pertumbuhan PDB sebesar -4.1% yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan PDB tahun 2016 yang mencapai 5.2% sedangkan untuk pertumbuhan *broad money* (M2) hanya 8.4% , yang berarti lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan *broad money* (M2) pada tahun 2020. Sehingga jika dilihat lebih lanjut, hal ini kontradiksi terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Asnawi dan Fitria (2018), Jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehingga jika diamati dari data pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), skor CPI (*Corruption Perception Index*), Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan *broad money* (M2) 7 negara anggota ASEAN disepanjang tahun 2012-

2020 yang kontradiksi terhadap beberapa teori seperti yang telah diuraikan diatas, jelas memunculkan suatu pertanyaan mengenai pengaruh korupsi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap pertumbuhan ekonomi di 7 negara anggota ASEAN.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik: Adam Smith

Berdasarkan pandangan Adam Smith, jika pertumbuhan penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga output atau hasil output juga demikian (Arsyad,2010). Dalam pandangan Adam Smith, didalam pasar terdapat "*Invisible Hand*" yang supaya suatu perekonomian tetap dalam kondisi keseimbangan, maka *Invisible Hand* dalam hal ini memiliki fungsi sebagai pengalokasi setiap sumber daya. Kebijakan pasar bebas dan pengurangan intervensi pemerintah (*Laissez Faire*) juga dinilai dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut.

Menurut Adam Smith, intervensi pemerintah didalam perekonomian hanya akan memberikan gangguan terhadap kerja dari mekanisme pasar. Secara historis, ada beberapa faktor yang memiliki hubungan dalam proses pertumbuhan ekonomi, seperti pembagian kerja, pengembangan hak milik dan spesialisasi.

Terdapat beberapa persepsi yang sama dari para ekonom mazhab ini mengenai tatanan ekonomi masyarakat, yaitu:

- 1) Jiwa dalam suatu perekonomian adalah kebijakan pasar bebas (*Laissez Faire*), dengan demikian setiap individu ataupun unit-unit usaha pada dasarnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus diberikan kebebasan (*Freedom*).
- 2) Manfaat yang diterima masyarakat akan jauh lebih besar jika mekanisme pasar dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada campur tangan pemerintah didalamnya. Pemerintah memiliki peran dengan diberikan beberapa batasan, seperti bidang pertahanan, hukum dan hal lain yang berkaitan dengan penyediaan jasa untuk publik.
- 3) Memperoleh mekanisme tarik-menarik antara permintaan dan penawaran dipasar.

Berdasarkan padangan mazhab ini, terdapat suatu syarat yang mutlak diperlukan supaya terwujud suatu keserasian dalam hal kehidupan ekonomi serta kesejahteraan umum yaitu spesialisasi, efisiensi, dan pasar bebas (Arsyad, 2010).

The Theory of Moral Sentiments

The Theory of Moral Sentiments adalah buku pertama yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1759. Salah satu yang dibahas didalam buku ini

mengenai egoisme, dimana setiap orang digambarkan memiliki rasa saling simpati atau tenggang rasa satu sama lain dan rasa simpati ini menjadi pengerem nafsu keserakahan.

Dalam diri manusia terdapat dua sifat yang berbeda yaitu tenggang rasa dan egoisme, rasa simpati dan serakah sehingga setiap langkah dan tindakan manusia selalu merupakan hasil bekerjanya dua kekuatan yang telah mencapai keseimbangan.

Dalam *Theory of Moral Sentiments*, simpati diartikan sebagai pembawaan manusia yang mengendalikan kepentingan pribadi. Jika seseorang bersimpati terhadap orang lain maka ia akan mengendalikan egoismenya yang berarti pengejaran kepentingan pribadi tidak akan dibiarkan melampaui batas.

Manusia individu rasional (*Homo Economicus*) cenderung diabaikan sebagai suatu asumsi yang tanpa disadari lama kelamaan diyakini sebagai sebagai suatu kebenaran, bahwa manusia rasional memang harus memiliki perilaku demikian. Semula diasumsi kemudian menjadi suatu *mind-set*, lalu menjadi *self-fulfilling presumption* (Rintuh dan Miar, 2005).

Teori Keynes

Teori ini tidak dapat mempertahankan sistem *Leissez Faire* murni, menurut teori ini pemerintah perlu berperan aktif dan sadar dalam mengendalikan perekonomian yang mengarah ke posisi "*Full Employment*". Hal ini disebabkan karena mekanisme otomatis ke arah *Full Employment* tidak dapat untuk diandalkan secara otomatis.

Sukirno dalam Azwar (2016) Pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan maksimal jika ada campur tangan pemerintah didalamnya. Pendapat Keynes mengenai hal ini berimplikasi pada peran pemerintah dalam mengelola perekonomian demi menjamin kestabilan pertumbuhan, hal ini bisa dalam bentuk kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) ataupun dalam bentuk kebijakan fiskal (pajak dan belanja pemerintah).

Permintaan Agregat masyarakat menurut Keynes menentukan situasi ekonomi secara makro, dimana situasi kekurangan produksi dapat terjadi saat permintaan agregat lebih tinggi dari penawaran agregat dalam periode tersebut. Sehingga di periode selanjutnya, antara output dengan harga akan mengalami kenaikan, atau kedua-duanya mengalami kenaikan. Sebaliknya, situasi kelebihan produksi akan terjadi disaat penawaran agregat melebihi permintaan agregat yang akan berdampak pada periode berikutnya dalam bentuk penurunan pada output atau harga, atau kedua-duanya mengalami

penurunan.

Permintaan agregat dalam hal ini merupakan seluruh jumlah uang yang di belanjakan oleh masyarakat baik itu untuk membeli barang ataupun jasa dalam periode satu tahun. Permintaan agregat dalam perekonomian tertutup terdiri dari tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran Konsumsi oleh Rumah Tangga (C)
- 2) Pengeluaran Investasi oleh Perusahaan (I)
- 3) Pengeluaran Pemerintah (G), pemerintah dalam hal ini dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap permintaan agregat dengan melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap konsumsi dan investasi.

Jika dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Z = C + I + G$$

Pendapatan yang diterima Rumah Tangga dan *Propensity to Consume* mempengaruhi/menentukan C. I dipengaruhi/ditentukan oleh *Marginal Efficiency of Capital* dan Tingkat Bunga. Sedangkan G dipengaruhi/ditentukan oleh proses politik yang kompleks atau dalam teori makro disebut eksogen.

Perubahan pada C, I, dan G dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui proses *multiplier*. Apabila unsur itu meningkat 1 satuan, maka permintaan agregat juga akan meningkat 1 satuan pelipat atau *multiplier*, tergantung besarnya *Marginal Propensity to Consume*.

Korupsi

Korupsi adalah suatu gejala masyarakat yang dapat dengan mudah dijumpai, sebab hampir tiap negara selalu dihadapkan pada masalah korupsi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak berlebihan jika pengertian korupsi juga mengalami perkembangan.

Menurut Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1), korupsi adalah tindakan melawan hukum dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian dalam hal keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dapat berdampak merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dimana perbuatan ini dilakukan oleh setiap orang baik itu pejabat pemerintah atau dari sektor swasta.

Sugito (2021), menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapa tujuh jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor yaitu sebagai berikut :

- 1) Kerugian keuangan negara

- 2) Suap Menyuaup
- 3) Penggelapan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan Curang
- 6) Gratifikasi
- 7) Benturan kepentingan dalam pengadaan

CPI (Corruption Perception Index)

Transparency International merupakan salah satu lembaga yang melakukan survei kepada para pengusaha, masyarakat, dan para ahli tentang persepsi korupsi di suatu negara. Persepsi korupsi dari masyarakat, pengusaha, dan ahli ini selanjutnya disajikan dalam bentuk indeks yang disebut sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI).

Transparency International (2017) menjelaskan melalui laporannya mengenai tinggi rendahnya CPI disetiap negara kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- 1) Instistusi publik, pemerasan, masifnya penyuaupan, serta penyalahgunaan dalam hal anggaran menjadi faktor yang membuat CPI rendah.
- 2) Kebebasan fers, kuatnya standar integritas, keleluasaan dalam mengakses informasi, serta peradilan yang independen, menjadi faktor penyebab CPI tinggi.

Teori CMDA (Robert Klitgaard)

Teori CMDA (*CMDA Theory*) atau sering juga disebut Teori Persamaan (*Equation Theory*) merupakan teori tentang penyebab terjadinya korupsi yang dicetuskan oleh Robert Klitgaard. Klitgaard menggambarkan pengertian korupsi secara umum kedalam rumus:

$$C = M + D - A$$

Dimana C sebagai *Corruption* (korupsi), M sebagai *Monopoly* (monopoli), D sebagai *Discretion* (kewenangan, dan A sebagai *Acuntability* (akuntabilitas. Dari rumus tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa korupsi merupakan fungsi dari monopoli ditambah kewenangan dikurangi akuntabilitas. Jadi korupsi akan terjadi jika ada kegiatan monopoli kekuasaan ditengah kondisi ketidakjelasan kewenangan dan aturan, akan tetapi akuntabilitas dan pertanggung jawaban kepada publik tidak ada mekanismenya.

Pengeluaran pemerintah

Salah satu komponen dalam kebijakan fiskal yang memiliki tujuan untuk meningkatkan laju investasi, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan maupun belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah. Basri dan Subri (2003) menjelaskan pengeluaran pemerintah terdiri dari beberapa bentuk/jenis (bervariasi) yang secara garis

besarnya dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran sebagai investasi
- 2) Pengeluaran yang secara langsung dapat memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat.
- 3) Pengeluaran sebagai bentuk penghematan.
- 4) Pengeluaran sebagai penyedia kesempatan kerja dan menyebarkan daya beli yang lebih luas.

Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Hyman (1996) menerangkan bahwa pengeluaran pemerintah ada yang dilakukan distribusi dengan daya beli di tengah masyarakat yang dikenal dengan pembayaran transfer pemerintah. Dimana pembayaran transfer dapat membuat sumber-sumber pendapatan menyokong pada penerimaan yang tidak dapat memberikan pelayanan balasan dari pendapatan yang akan diterima selanjutnya.

Keuangan pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Basri dan Subri, 2003).

Teori Adolf Wagner

Pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah menurut teori ini akan semakin meningkat. Hal ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan meningkat disaat pendapatan perkapita meningkat, dimana hal ini terjadi karena pemerintah harus mengatur beberapa hal yang muncul dilingkungan masyarakat, hukum, rekreasi, pendidikan, kebudayaan, dan hal lainnya.

Jika dilihat dari hukum Wagner, ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat, seperti karena terjadi peningkatan fungsi pertahanan; keamanan; dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, peningkatan fungsi perbankan, serta terjadi peningkatan fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PP_1P}{PPK_1} < \frac{P_1PP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{P_nPP_n}{PPK_n}$$

Dimana:

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu

GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)

Pada dasarnya inti dari teori ini adalah bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita secara relatif. Walaupun demikian, Wagner mengakui bahwa hubungan antar industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya akan menjadi kompleks atau menjadi semakin rumit disaat perekonomian

mengalami pertumbuhan.

Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar (JUB) adalah sebuah jenis uang yang berada di perekonomian yang dikeluarkan dan diedarkan secara resmi oleh Bank Sentral untuk uang kartal, dan Bank Umum menerbitkan uang giral maupun uang kuasi (tabungan, valas dan sebagainya. Jenis-jenis uang beredar di Indonesia terdiri dari:

- Uang beredar dalam arti sempit (M1)
- Uang beredar dalam arti luas (M2)

M1 adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral) dan Bank Umum terhadap sektor swasta domestik atau penduduk meliputi uang kartal (C: uang kertas dan uang logam) yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan uang giral (D: deposito yang disimpan dalam bank-bank umum, dan dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek, rekening giro, atau surat perintah lainnya). Uang kartal dan giral memiliki sifat dapat dipakai sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu atau setiap saat bila diinginkan karena sifatnya yang likuid dan tidak terkait waktu dalam pemakaiannya. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$M1 = C + D$$

M2 dikenal dengan istilah *Broad Money*, sering juga disebut dengan liquiditas perekonomian karena dapat mempengaruhi perkembangan tingkat harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya. M2 susunannya terdiri dari M1 ditambahkan dengan deposito berjangka (TD: *time deposti*) dan saldo tabungan milik masyarakat yang berada di bank (SD: *saving deposit*), sehingga dapat dirumuskan menjadi:

$$M2 = M1 + TD + SD$$

Teori Kuantitas Uang Irving Fisher

Menurut teori ini, terdapat keterkaitan antara JUB dengan total pengeluaran dari barang/jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian. Fisher dalam hal ini lebih mendorong untuk orang yang memegang uang untuk melakukan transaksi. Total pengeluaran dalam teori ini dibagi kedalam dua variabel, yaitu P untuk harga dan T untuk Transaksi.

$$\text{Uang x Perputaran} = \text{Harga x Transaksi}$$

$$M \cdot V = P \cdot T$$

Dimana :

- M: Jumlah uang beredar
- V: *Velocity* / perputaran uang dalam satu periode
- P: Harga barang dan jasa
- T: Jumlah transaksi

Pada sisi kanan mencerminkan transaksi

dalam perekonomian, dimana P untuk harga rata-rata dan T untuk jumlah transaksi dalam perekonomian dalam periode tertentu. Sedangkan pada sisi kiri mencerminkan jumlah uang yang digunakan untuk transaksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, dimana M untuk kuantitas uang dan V untuk perputaran uang transaksi. V digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat dimana uang bersikulasi dalam perekonomian. Menurut Mankiw (2007), persamaan kuantitas adalah sebuah identitas: definisi dari empat variabel membuatnya benar. Dimana persamaan tersebut berguna dalam memperlihatkan perubahan dari variabel-variabel tersebut, jika satu variabel mengalami perubahan, maka variabel lain juga akan mengalami perubahan untuk menjaga persamaan. Namun, pada persamaan tersebut ada permasalahan, yaitu sulit untuk mengukur transaksi. Sehingga dalam upaya memecahkan permasalahan ini, T diganti menjadi Y (output total dari perekonomian). Semakin banyaknya produksi dalam perekonomian membuat barang dan atau jasa semakin banyak untuk dibeli/dijual menjadi alasan kenapa T dan Y dikatakan berkaitan. Akan tetapi keduanya tidaklah sama. Total pengeluaran bisa mengalami perubahan, oleh karena itu Fisher memisahkannya menjadi Kuantitas Barang untuk Y dan Harga dari Barang untuk P. Sehingga persamaannya menjadi:

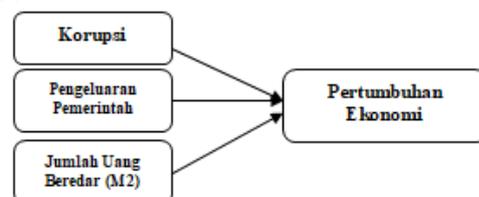
$$\text{Uang x Perputaran} = \text{Harga x Output}$$

$$M \cdot V = P \cdot Y$$

Oleh karena Y adalah pendapatan total, maka V akan menjadi perputaran pendapatan uang. Dimana perputaran pendapatan uang mengartikan berapa kali uang masuk kedalam pendapatan seseorang pada periode tertentu.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan mengenai manfaat dari tinjauan pustaka dan kajian-kajian teori diatas, maka kerangka berfikir tentang pengaruh korupsi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN dapat diuraikan dan disusun secara teoritis sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Sebuah jawaban yang sifatnya sementara terhadap masalah yang sudah dirumuskan dari penelitian dikenal dengan istilah hipotesis. Dalam sebuah hipotesis, jawaban yang diberikan hanya berdasar pada teori yang relevan dengan penelitian saja dan hipotesis dapat juga dikatakan sebagai konklusif sementara.

Sehingga dari hal itu, diajukanlah beberapa hipotesis berikut ini:

H_0 : Tidak ada Pengaruh Korupsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN.

H_a : Ada Pengaruh Korupsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat ilmiah yang sistematis terhadap beberapa bagian dan fenomena serta hubungan antar bagian dan fenomena itu sendiri. Melakukan pengembangan dan memanfaatkan model bentuk matematis, hipotesis yang memiliki hubungan dengan fenomena alam, dan teori-teori adalah tujuan digunakannya pendekatan kuantitatif (Abdullah & Saibani, 2014). Hadi & Widyarini (2009) menjelaskan penelitian kuantitatif sebagai satu diantara jenis penelitian yang datanya dalam bentuk angka sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis dengan pendekatan statistik.

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory*. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang akan diujikan kebenarannya. Hipotesis ini memberikan gambaran mengenai hubungan yang ada diantara dua variabel dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel yang lain, atau apakah variabel dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Data sekunder dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang berbentuk data panel dipilih dalam penelitian ini, data *Time Series* (2012-2020) dan data silang (7 negara anggota ASEAN), sehingga total data yaitu 81 data. Dimana data tersebut diperoleh dari publikasi Bank Dunia (*World Bank*) di *website* www.data.worldbank.org, data yang dimaksud adalah *GDP Growth*, *General Government Final Consumption Expenditure*, dan *Broad Money Growth* di ASEAN. Selain itu juga, data diperoleh dari publikasi *Transparency International* di *website*

www.transparency.org/en/cpi, data yang diperlukan adalah *Corruption Perception Index* (CPI) di ASEAN.

Data yang dikumpulkan didalam penelitian menggunakan teknik studi dokumentasi, dimana studi dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data sekunder.

Definisi Operasional

Variabel dependen didalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y), variabel independen (X) yaitu korupsi (COR), pengeluaran pemerintah (GE), dan Jumlah Uang Beredar (M2) (JUB). Sehingga variabel-variabel yang digunakan dalam ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Korupsi didalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk skor CPI (*Corruption Perception Index*) yang dipublikasikan oleh *Transparency International* dengan skor 0 sampai 100. Skor 100 berarti suatu wilayah bebas dari korupsi dan sebaliknya jika skor mendekati 0 maka semakin korup (Indeks). Dasar perhitungan skor CPI berasal gabungan data-data dari berbagai sumber terkait dengan korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen dan institusi ternama.
- 2) Pengeluaran Pemerintah didalam penelitian ini dinyatakan dalam *General Government Final Consumption Expenditure (Percen on GDP)* Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Umum yang dipublikasikan oleh *World Bank* (Persen). Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah adalah pengeluaran atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pemerintah umum, terdiri dari jasa kolektif serta barang dan jasa individu (BPS, 2022). *General Government Final Consumption Expenditure (Percen on GDP)* didapatkan dari hasil perhitungan:
$$\frac{\text{General Government Final Consumption Expenditure}}{\text{Total GDP}} \times 100\%$$
- 3) Jumlah Uang Beredar (M2) didalam penelitian ini dinyatakan dalam *Broad Money Growth* yang dipublikasikan oleh *World Bank* (Persen). *Broad Money Growth* atau Pertumbuhan Uang dalam arti luas adalah
$$\frac{\text{Broad Money } t - \text{Broad Money } t-1}{\text{Broad Money } t-1} \times 100\%$$
- 4) Pertumbuhan Ekonomi didalam penelitian ini dinyatakan dalam *Gross Domestic Product (GDP) Growth* yang dipublikasikan oleh *World Bank* (Persen). *Gross Domestic Product (GDP) Growth* atau Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah
$$\frac{\text{PDB Tahun } t - \text{PDB Tahun } t-1}{\text{PDB Tahun } t-1} \times 100\%$$

Teknik Analisis

Regresi data panel dipilih sebagai teknik analisis didalam penelitian ini. Sedangkan untuk

menganalisis data dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah program E-Views 12. Berikut adalah persamaan dasar regresi data panel secara umum.

$$EG_{it} = \alpha + \beta_1 Cor_{it} + \beta_2 GE_{it} + \beta_3 JUB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- GE : Pertumbuhan Ekonomi
 α : Konstanta
 $\beta_1 Cor_{it} + \beta_2 GE_{it} + \beta_3 JUB_{it}$
Cor : Korupsi
GE : Pengeluaran Pemerintah
JUB : Jumlah Uang Beredar (M2)
 ε : Koefisien Error
i : Jumlah Negara Anggota ASEAN
t : Periode Waktu Penelitian, yaitu tahun 2012 sampai 2020.

Metode Data Panel

Common Effect Model (CEM)

Model ini sering dikatakan sebagai model yang paling sederhana, hal ini didasari oleh pendekatan dalam model ini yang dinilai mengabaikan dimensi ruang dan waktu yang ada pada data panel dengan hanya melakukan kombinasi antara data *Cross Section* dan *Time Series*. Sehingga dengan dilakukannya penggabungan tersebut, maka tidak akan terlihat perbedaan yang ada baik antar individu maupun antar waktu. Selanjutnya data gabungan tersebut dilakukan estimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). OLS adalah suatu metode yang umumnya digunakan untuk melakukan estimasi fungsi regresi populasi dari fungsi regresi sampel.

Fixed Effect Model (FEM)

Winarno (2007), menjelaskan bahwa FEM memiliki kemampuan untuk memperlihatkan perbedaan konstan antar objek walaupun koefisien regresornya sama. FEM juga melakukan perhitungan mengenai beberapa kemungkinan penelitian dalam menghadapi *Omitted variables* yang kemungkinan dapat membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*.

Random Effect Model (REM)

REM digunakan untuk tujuan mengatasi beberapa kelemahan yang ada pada FEM yang menggunakan variabel semu, sehingga dinilai terjadi ketidakpastian pada model. Sedangkan pada REM menggunakan residual (bukan variabel semu) yang mana ada dugaan terdapat hubungan antar waktu dan antarobjek.

Winarno (2007), menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis *Random Effect Model* syaratnya adalah objek data silang harus lebih besar dari

banyaknya koefisien.

Pemilihan Metode Estimasi dalam Data Panel

Ada beberapa uji yang bisa untuk dilakukan yang digunakan sebagai alat dalam melakukan pemilihan model regresi data panel yang sesuai/tepat, yaitu sebagai berikut:

Uji Chow (CEM vs FEM)

Uji ini bertujuan untuk memilih uji terbaik antara CEM dengan FEM. Hipotesa yang dapat diterapkan dalam uji ini adalah sebagai berikut :

- 1) H_0 : *Commen Effect Model*
- 2) H_a : *Fixed Effect Model*

Sedangkan untuk pedoman pengambilan keputusan pada Uji Chow adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi $> \alpha$ maka H_0 diterima (Pilih CEM).
- 2) Apabila nilai signifikansi $< \alpha$ maka H_0 ditolak (Pilih FEM).

Uji Hausman (FEM vs REM)

Uji Hausman dilakukan untuk melihat model regresi data panel mana yang terbaik diantara REM dengan FEM.

Hipotesa yang digunakan didalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 : *Random Effect Model*
- 2) H_a : *Fixed Effect Model*

Sedangkan pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jikalau didapatkan nilai signifikansi $> \alpha$ maka H_0 diterima.
- 2) jikalau didapatkan nilai signifikansi $< \alpha$ maka H_0 ditolak.

Uji Lagrange Multiplier (CEM vs REM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk melihat model regresi data panel mana yang terbaik diantara CEM) dengan FEM. Hipotesa yang digunakan pada uji LM adalah sebagai berikut:

- H_0 : *Common Effect Model*
- H_a : *Random Effect Model*

Sedangkan dalam hal pengambilan keputusan, uji LM berdasar pada distribusi *chi-squared* (derajat bebas = 1). Sehingga apabila diperoleh hasil statistik LM lebih besar daripada nilai kritis statistik *Chi-square* maka H_0 ditolak. Sebaliknya, jika hasil statistik LM lebih kecil dari nilai kritis statistik *Chi-square* maka H_0 diterima.

Uji Hipotesis

Hasil perhitungan regresi data panel dengan perhitungan menggunakan program E-Views perlu untuk dilakukan uji asumsi klasik dan uji statistik. Berikut adalah penjelasan masing-masing uji tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Ada atau tidaknya korelasi yang kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi bisa dilihat dan dibuktikan dengan melalui uji multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan E-Views, yaitu dengan melihat korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Jika variabel bebas memiliki tingkat korelasi yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel ini tidak orthogonal. Dimana variabel orthogonal itu sendiri variabel bebas yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk melakukan deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi, maka pedoman yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jikalau didapatkan nilai koefisien korelasi $> 0,8$, maka terjadi multikolinearitas.
- 2) Jikalau didapatkan nilai koefisien korelasi $< 0,8$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Jika seorang peneliti ingin melakukan pengujian mengenai ketidaksamaan *variance* pada model regresi dari residual satu antar pengamatan, maka uji asumsi klasik yang tepat untuk permasalahan itu adalah uji heterokedastisitas.

Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 : Tidak terjadi heterokedastisitas pada sebaran data
- 2) H_a : Terjadi heterokedastisitas pada sebaran data

Sedangkan untuk mengambil keputusan dalam uji ini dapat dilakukan dengan mengikuti pedoman berikut:

- 1) Jikalau didapatkan nilai *probability* $< \alpha$ maka H_0 ditolak (Terjadi heterokedastisitas pada sebaran data)
- 2) Jikalau didapatkan nilai *probability* $> \alpha$ maka H_0 diterima (Tidak terjadi heterokedastisitas pada sebaran data).

Uji Statistik

Gujarati (2003), menjelaskan bahwa uji statistik dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian diterima atau ditolaknya hasil hipotesis nol (H_0) dari sampel (secara statistik). Dimana untuk memutuskan dilakukannya pengolahan hipotesis nol didapatkan dari data yang dimiliki. Berikut adalah uji statistik yang dapat dilakukan didalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R-Squared)

R-Squared mampu memberikan informasi mengenai besar-kecilnya kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu juga, R-squared dapat memperlihatkan kemampuan garis regresi untuk menjelaskan ragam dari variabel dependen yang dalam hal ini bisa diterangkan oleh variabel independen.

Nilai dari koefisien determinasi berkisaran diantara 0 sampai 1. Apabila R-Squared mendekati 1, maka variabel-variabel independen mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sehingga dapat dikatakan, semakin mendekati 1 maka semakin baik (Perdana, 2016).

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Adapun dalam pengambilan keputusan dalam uji F dapat dilakukan dengan mengikuti pedoman berikut:

- 1) Jikalau didapatkan nilai signifikan $F < \alpha$ maka H_a diterima (variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen).
- 2) Jikalau didapatkan nilai signifikan $F > \alpha$ maka H_0 diterima (variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen).

Regresi Parsial (Uji T)

Regresi Parsial dapat memperlihatkan sejauh mana variabel terikat mampu dipengaruhi oleh variabel bebas (secara individual). Regresi Parsial dalam hal ini bisa untuk diterapkan dengan melakukan pengamatan terhadap tingkat signifikansi yang kemudian dilakukan perbandingan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Sedangkan untuk mengambil keputusan dalam uji t, dilakukan dengan mengikuti pedoman berikut:

- 1) Jikalau didapatkan nilai signifikansi $> \alpha$ maka H_0 diterima.
- 2) Jikalau didapatkan nilai signifikansi $< \alpha$ maka H_0 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deksripsi Data

Berdasarkan dengan judul dan perumusan masalah penelitian, dimana penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni meliputi data mengenai Pertumbuhan Ekonomi (Y), Korupsi (Cor), Pengeluaran Pemerintah (GE), dan Jumlah Uang Beredar (M2). Berikut ini adalah deskripsi data untuk masing-masing variabel:

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang merubah kondisi dalam perekonomian di

suatu negara secara berkelanjutan menuju kearah yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga, pertumbuhan ekonomi bisa juga dikatakan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi dalam perekonomian dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Anggraeni, 2012).

Tahun 2012 merupakan tahun dimana laju pertumbuhan PDB di 2 negara anggota ASEAN (Indonesia dan Thailand) berada pada persentase yang tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan 5 negara lainnya. Sedangkan pertumbuhan PDB terendah di 7 negara anggota ASEAN sepanjang tahun 2012-2020 berada pada tahun 2020, dimana pertumbuhan PDB 6 negara anggota ASEAN minus dan hanya ada 1 negara yang tidak minus yaitu negara Vietnam (2,9%). Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDB 7 negara anggota ASEAN mengalami fluktuasi dan tahun 2020 merupakan tahun dimana pertumbuhan PDB setiap negara mengalami kemerosotan.

Tahun 2020 merupakan tahun dimana hampir seluruh negara mengalami kontraksi dalam hal pertumbuhan ekonominya. Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) merupakan penyebab hal ini bisa terjadi, mewabahnya virus ini membuat kegiatan perekonomian suatu negara mengalami perlambatan atau bahkan ada yang sampai lumpuh total. Pembatasan sosial diberlakukan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Kebijakan ini memberikan dampak sangat besar bagi seluruh lapisan masyarakat, banyak usaha-usaha mikro/kecil/menengah gulung tikar, para pekerja di PHK, dan semua kegiatan yang menimbulkan keramaian harus dibatasi atau bahkan ada yang sampai harus ditutup total. Sehingga hal ini memberikan dampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, negara anggota ASEAN tidak terlepas dari permasalahan ini. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, ada 1 negara yang pertumbuhan PDB nya masih positif, yaitu Vietnam (2,9%).

Vietnam menunjukkan kesuksesannya dalam menangani pandemi COVID-19 dinegaranya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam berhasil menekan angka penyebaran pandemi COVID-19 dan berhasil menekan jumlah kematian, sehingga jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Vietnam paling sukses dalam memerangi virus COVID-19. Gunadha (2020) negara Vietnam memiliki tegas dalam kebijakannya mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu juga, pemerintah Vietnam berhasil mengatasi permasalahan ekonomi di negaranya. Kebijakan diplomatik negara Vietnam yang mandiri, independen, terbuka, multilateralisme, dan secara aktif melakukan integrasi internasional

membantu negara Vietnam membentuk 30 mitra strategis dan mitra komprehensif, ikut serta pada perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik (CTPP).

Korupsi

Menurut UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah suatu tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau suatu korporasi/orang lain, penyalahgunaan wewenang, kesempatan yang dimiliki, atau sarana yang dimilikinya karena sebab adanya jabatan atau kedudukan sehingga memberikan dampak yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Hanya ada 2 negara yang memiliki skor CPI diatas 40 di setiap tahunnya, yaitu Singapura dan Malaysia. Kamboja merupakan negara yang memiliki skor CPI terendah sepanjang tahun 2012-2020 jika dibandingkan dengan 6 negara anggota ASEAN yang lain. Skor CPI yang rendah atau mendekati 0 (nol) disuatu negara menunjukkan bahwa korupsi di negara tersebut sangat parah. Sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum negara anggota ASEAN sulit untuk lepas dari jeratan korupsi yang sudah mengakar.

Singapura merupakan negara dengan skor CPI tertinggi jika dibandingkan dengan 6 negara anggota ASEAN lainnya. Dimana sepanjang tahun 2012-2020, skor CPI Singapura selalu berada diatas 80. Hal ini berawal dari pembentukan suatu lembaga antikorupsi yang independen yaitu, *Corruption Practices Investigation Bureau* (CPIB). Dimana lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga antikorupsi yang menerima dan memiliki kewenangan melakukan investigasi terhadap praktik korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta. CPIB tidak hanya menangani kasus-kasus korupsi besar, namun juga kasus korupsi kecil serta kasus korupsi di sektor swasta. Pemerintah yang terindikasi melakukan korupsi akan ditindak tegas oleh CPIB, hal ini dapat terjadi karena semenjak pemerintahan Lee Kuan Yew, *political will* yang tinggi untuk memberantas korupsi di Singapura benar-benar dijalankan dan diberlakukan secara efektif tanpa memandang bulu.

Selain itu juga, Singapura mengaplikasikan langkah-langka memberantas korupsi seperti yang diuraikan oleh Robert Klitgaard, yaitu pertama mengubah sistem *reward and punishment*, dengan cara memberikan surat pujian dan kenaikan pangkat kepada pegawai negara dan berprestasi sedangkan segi hukuman yang diterapkan yaitu pemberian sanksi administratif yang berkaitan dengan masa depan dan karir jabatan pegawai. Kedua, pengumpulan informasi selengkap dan seakurat mungkin tentang

jumlah kekayaan oleh seorang warga negara Singapura. Ketiga, penyusunan *patron-client* antara pegawai dan atasan melalui rotasi karyawan atau atasan dalam sebuah divisi ke divisi lain secara berkala. Keempat, merubah pandangan masyarakat mengenai praktik korupsi dengan melalui pesan-pesan moral kepada lembaga/instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, dan masyarakat umum.

Dilain hal, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki rata-rata CPI sepanjang tahun 2012-2020 di bawah 40, yaitu sebesar 36,11. Pada dasarnya di Indonesia upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun sampai pada saat sekarang ini masih sering terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Argiya (2013), salah satu penyebab korupsi tumbuh subur di Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. *Money oriented* adalah salah satu budaya yang masih banyak dipegang oleh masyarakat Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Padahal Indonesia terkenal dengan negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris memang bila mengetahui negara ini jika dilihat dari rata-rata skor CPI sepanjang tahun 2012-2020 hanya 36,11 atau terendah ke-4 setelah Philippines (35,11), Vietnam (33,11), dan Kamboja (20,78) yang artinya korupsi di Indonesia tertinggi ke-4 setelah Philippines, Vietnam, dan Kamboja.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah anggaran maupun belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dan mensejahterakan masyarakatnya, pengeluaran pemerintah terdiri dari barang modal, barang konsumsi dan atas jasa-jasa (Sukirno, 2010).

Pengeluaran pemerintah 7 negara anggota ASEAN mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2012-2020, Thailand merupakan negara dengan persentase pengeluaran pemerintah terbesar jika dibandingkan dengan 6 negara anggota ASEAN lainnya, dimana sepanjang tahun 2012-2020 pengeluaran pemerintah Thailand selalu berada diatas 11% dan puncaknya pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah Thailand mencapai 17,7%. Sebaliknya, Kamboja merupakan negara dengan persentase pengeluaran pemerintah terendah jika dibandingkan dengan 6 negara anggota ASEAN lainnya, dimana sepanjang 2012-2020 pengeluaran pemerintah Kamboja selalu

berada dibawah 6%. Akan tetapi secara keseluruhan pengeluaran pemerintah di 7 negara anggota ASEAN sepanjang tahun 2012-2020 selalu berada diatas 4%.

Tingginya pengeluaran pemerintah Thailand disepanjang tahun 2012-2020 dengan rata-rata mencapai 16,66%, hal ini tidak terlepas dari strategi nasional Thailand yang mengacu pada penggunaan sumber daya publik secara efektif melalui tata kelola anggaran yang efektif sebagai faktor penting untuk mencapai tujuannya. Dimana Thailand berusaha Untuk menjadi negara dengan pengasilan tinggi pada tahun 2037. Selain itu juga, Thailand dalam hal ini melakukan tinjauan penganggaran OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) secara paralel dengan Rencana Aksi Penganggaran Gender (*Gender Budgeting Action Plan*) dan didasarkan pada OECD 2015 dari Rekomendasi Dewan Tata Kelola Anggaran (*Recomendation of the Council on Budgetary Governance*).

Indonesia merupakan negara dengan rata-rata pengeluaran pemerintah sepanjang tahun 2012-2020 sebesar 9,30. Asahdi dkk (2015), dalam mengelolah sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah, pemerintah dalam hal ini melakukan berbagai kebijakan baik di bidang moneter maupun fiskal. Indonesia sebagai negara yang tengah giat-giatnya menggalakkan pembangunan, menyadari akan pentingnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengeluaran pemerintah untuk hal ini tidaklah sedikit, kekurangan dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah di APBN selalu ditutupi dengan utang, terutama utang luar negeri.

Jumlah Uang Beredar (M2)

Ambarwati dkk (2021), mengartikan uang sebagai suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku didalam wilayah tertentu. Sedangkan jumlah uang beredar adalah hasil kali uang primer dengan pengganda uang. Besarnya jumlah uang beredar dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai proses pasar. Jumlah uang beredar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) dan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2).

Broad Money (M2) pada tahun 2012 di 6 negara anggota ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand) mengalami pertumbuhan tertinggi jika berdasar pada pertumbuhan *Broad Money* (M2) di masing-masing negara sepanjang tahun 2012-2020. Sedangkan 1 negara lainnya, yaitu Philippines mengalami pertumbuhan dalam hal *Broad Money* (M2) tertinggi yaitu pada tahun 2013 yang mencapai 29,3%.

Singapura merupakan satu diantara dua

negara lainnya yang pertumbuhan *broad money* (M2) nya berada dibawah 6%. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moneter yang diterapkan di Singapura.

Pada Januari 2015, sebagai tanggapan terhadap penurunan inflasi yang diharapkan dan prospek pertumbuhan yang lebih tidak pasti, Otoritas Moneter Singapura atau MAS (*Monetary Authority of Singapore*) mengurangi laju apresiasi NEER (*the Nominal Effective Exchange Rate*) band. Prospek inflasi jangka pendek dan menengah yang menjanjikan menjamin pelonggaran relatif moneter. Kerangka kebijakan moneter yang kuat dan fleksibel tapi peningkatan *leverage* domestik dan volatilitas nilai tukar memerlukan kewaspadaan tinggi dalam menilai keseimbangan kekuatan antara berbagai saluran kebijakan moneter.

Indonesia merupakan negara dengan rata-rata pertumbuhan *broad money* (M2) tertinggi ke 4, yaitu sebesar 10,25%, setelah Philippines (12,24%), Vietnam (16,96%), dan Kamboja (23,76%). Lestyowati (2014), salah satu penyebab uang beredar meningkat adalah mudik lebaran, jumlah uang beredar selama lebaran dipastikan sebagian mengalir ke daerah-daerah tujuan mudik, sehingga ada pergerakan uang dari kota ke desa. Dan ini adalah faktor penggerak perekonomian yang menyebar keseluruh wilayah yang menyebabkan terjadinya redistribusi pendapatan.

Hasil Analisis dan Uji Hipotesis

Hasil Uji Chow

Uji Chow merupakan suatu bentuk pengujian yang bertujuan untuk menentukan model mana yang terbaik diantara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	5.252193	(6,53)	0.0003
Cross-section	29.396766	6	0.0001
Chi-square			

Sumber: Hasil Olah Data E-Views 12

Dari perhitungan uji Chow dengan menggunakan software E-Views 12 dapat dilihat bahwa nilai prob. *Cross-section F* sebesar 0,0003 yang berarti nilainya < 0,05, sehingga dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Hal ini mengartikan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik/tepat dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Selanjutnya dapat dilakukan uji Hausman untuk menentukan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Hasil Uji Hausman

Uji Hausman adalah suatu jenis pengujian yang dilakukan untuk memilih model terbaik diantara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, dimana pengujian ini dilakukan setelah uji Chow dilakukan sebelumnya.

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	30.108387	3	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data E-Views 12

Dari hasil uji Hausman dengan menggunakan software E-Views 12 dapat dilihat bahwa nilai *Prob.Cross-section random* sebesar 0,0000 yang berarti nilainya < 0,05, sehingga dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Hal ini mengartikan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik/tepat dibandingkan dengan *Random Effect Model*. setelah Uji Chow dan Uji Hausman dilakukan, model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Oleh karena itu, Uji selanjutnya yaitu *Lagrange Multiplier* (LM) tidak dilakukan karena pada Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model yang paling tepat untuk digunakan.

Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model*.

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	38.50835	10.7221	3.591456	0.0007
Cor	-0.128328	0.211195	-0.607627	0.5460
GE	-2.879653	0.478491	-6.018200	0.0000
JUB	0.086704	0.086704	1.090143	0.2806
R-squared	0.496249		F-statistic	5.801180
Adjusted R-squared	0.410706		Prob(F-statistic)	0.000014

Sumber: Hasil Olah data E-Views 12

Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	Cor	GE	JUB
Cor	1	0.23476240	-0.5570022
GE	0.23476240	1	-0.6663319
JUB	-0.557002	-0.6663319	1

Sumber: Hasil Olah Data E-Views 12

Dari hasil pengolahan diatas, dapat dilihat tidak terdapat variabel yang memiliki nilai matriks korelasi (*Correlation matrix*) lebih dari 0.8. sehingga dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Heteroskedastisitas

Dalam upaya mengatasi adanya ketidakseimbangan varian dari error untuk semua

pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi, maka penelitian menggunakan koefisien estimasi yang *robust* atau kebal terhadap pelanggaran heterokedastisitas, yaitu koefisien estimasi *Huber White*.

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Menggunakan Koefisien *Huber White*.

Variabel	Coefficient	Std.Error	z-Satistic	Prob.
C	-0.993187	1.058823	-0.938010	0.3482
Cor	0.006348	0.009404	0.675046	0.4996
GE	0.147188	0.054752	2.688283	0.0072
JUB	0.050634	0.030034	1.685867	0.0918

Sumber: Hasil Olah Data E-Views 12

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan koefisien *Huber White*, variabel GE (Pengeluaran Pemerintah) memiliki probabilitas sebesar 0.0072 yang nilainya < alpha = 0,05. Pada dasarnya jika uji ini tidak menggunakan koefisien yang *robust* atau kebal, maka telah terjadi heterokedastisitas pada sebaran data. Akan tetapi, dalam penelitian ini seperti yang telah diuraikan diatas, dimana untuk uji heterokedastisitas telah menggunakan koefisien estimasi yang *robust* atau kebal (koefisien estimasi *Huber White*). Sehingga berdasarkan hal tersebut, terjadinya heterokedastisitas pada sebaran data di penelitian ini akan dibiarkan.

Uji Statistik

Dari hasil Regresi Data Panel dalam penelitian ini didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$EG = 38.50835 - 0.128328Cor - 2.879653GE + 0.086704JUB$$

Keterangan:

EG = Pertumbuhan Ekonomi

Cor = Korupsi

GE = Pengeluaran Pemerintah

JUB = Jumlah Uang Beredar (M2)

Uji Hipotesis Secara Menyeluruh (Uji F)

Pengujian hipotesis secara menyeluruh dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Besarnya F statistik menunjukkan signifikan atau tidaknya variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi variabel tidak bebas dengan signifikansi sebesar 5%. Dari hasil regresi data panel model *Fixed Effect* didapat F-statistic sebesar 5.801180 dengan prob(F-statistic) sebesar 0.000014 yang berarti Prob(F-statistic) nilainya < 0,05 maka Ho ditolak yang berarti variabel Korupsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Uang Beredar (M2) secara simultan atau serentak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN.

Uji Hipotesis Individu (Uji-t)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan tingkat kepercayaan 95% (alpha=0,05). Variabel Cor (Korupsi) dari hasil regresi data panel model *Fixed Effect* didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.5460 yang berarti dengan alpha = 0,05 variabel korupsi tidak signifikan, maka variabel Cor (Korupsi) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Variabel GE (Pengeluaran Pemerintah) dari hasil regresi data panel model *Fixed Effect* didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05 yang berarti variabel GE (Pengeluaran Pemerintah) signifikan 5% dan variabel GE (Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh terhadap variabel EG (Pertumbuhan Ekonomi).

Variabel JUB (Jumlah Uang Beredar (M2)) dari hasil regresi data panel model *Fixed Effect* didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.2806 yang berarti dengan alpha = 0,05 variabel JUB tidak signifikan, maka variabel JUB tidak berpengaruh terhadap variabel EG (Pertumbuhan Ekonomi).

Uji Determinan (R-squared)

Dari hasil regresi data panel mengenai Pengaruh Korupsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN, diperoleh nilai R2 sebesar 0.496249. Dimana R2 dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan dalam menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dari nilai R2 yang sudah ketahui, maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 49,6249% variasi Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen, yaitu Korupsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Uang Beredar (M2). Sedangkan 50,3751% variasi Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan dengan metode analisis regresi data panel ini menggunakan software E-Views 12 sebagai alat untuk menganalisis pengaruh korupsi, pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Berikut ini adalah persamaan yang didapatkan dari penelitian ini:

$$EG = 38.50835 - 0.128328Cor - 2.879653GE + 0.086704JUB$$

Nilai konstanta sebesar 38.50835 yang berarti bahwa jika variabel Korupsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Uang Beredar (M2) tidak mengalami perubahan atau dianggap nol, maka Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi adalah sebesar

38.50835 persen.

Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil regresi, dapat dilihat variabel korupsi (Cor) yang diwakili oleh CPI (*Corruption Perception Index*) memiliki koefisien sebesar -0.128328 dan nilai probabilitas sebesar 0.5460. Sehingga, dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$, variabel Cor tidak signifikan, maka variabel Cor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Temuan ini sejalan dengan Faisal dkk (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung dipengaruhi oleh korupsi, sebab dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi lebih mengarah pada inefisiensi proses produksi dan misalokasi sumber daya. Waluyo (2010), menyatakan bahwa korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap korupsi. Selain itu juga, ada beberapa penelitian lain yang bertolak belakang dengan penelitian ini, seperti Ichvani & Sasana (2019), yang menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Nawatmi (2016) *Corruption Perception Index* (CPI) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil regresi, dapat dilihat nilai koefisien pada variabel GE sebesar -2.879653 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 dan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha : 0,05$. Dari nilai tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel GE berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Hal ini menunjukkan jika pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi di ASEAN akan menurun sebesar 2.879653%.

Pengeluaran pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN disebabkan karena telah terjadi inefisiensi dalam pengeluaran pemerintah negara-negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan Merini & Saputra (2013), negara dengan penghasilan menengah keatas seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam justru memiliki tingkat pengeluaran sektor publik yang tinggi sehingga menjadi tidak efisien. Selain itu juga, ada beberapa penelitian lain yang bertolak belakang dengan penelitian ini, seperti Hidayat & Nalle (2017), Anitasari & Soleh (2015) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga jika dilihat lebih lanjut, realisasi pengeluaran pemerintah di salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia. Pengeluaran pemerintah dalam hal belanja kementerian dan lembaga di Indonesia pada tahun 2019 yang dilihat dari realisasi APBN (Anggara Pendapatan dan Belanja Negara) mencapai Rp.855,4 triliun, dimana Kementerian dan Lembaga mengalokasikan anggaran tersebut untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial. Sehingga dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak anggaran yang dialokasikan untuk hal yang bersifat konsumtif atau dalam artian belanja pemerintah dalam hal ini masih belum bisa dikatakan produktif.

Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil regresi, dapat dilihat bahwa variabel JUB memiliki koefisien sebesar 0.086704 dan nilai probabilitas sebesar 0.2806. Sehingga, dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$, variabel JUB tidak signifikan, maka variabel JUB tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Temuan ini bertolak belakang dengan Tegegne (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan Jumlah Uang Beredar secara luas berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB riil. Asnawi & Fitria (2018), Ambarwati dkk (2018) yang menyatakan bahwa Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Hal ini berarti jika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di ASEAN menurun atau dalam artian pengeluaran pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Sedangkan dua variabel independen lainnya (korupsi dan jumlah uang beredar (M2)) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN, yang berarti korupsi dan jumlah uang beredar (M2) tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Secara simultan atau serentak, korupsi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah uang beredar (M2) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Variabel korupsi dan jumlah uang beredar (M2) perlu diperhitungkan dalam melakukan peramalan terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Data korupsi dari sumber yang berbeda dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, agar dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Data jumlah uang beredar (M2) dari sumber yang berbeda dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, agar dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh jumlah uang beredar (M2) terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Dalam penelitian selanjutnya variabel independen dapat ditambah dengan memasukkan variabel ekonomi makro, misalnya inflasi dan pengangguran.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Ratu Eva Febriani SE., M.Sc. yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun non-materil, sehingga artikel ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Sutanto, T.E.,2015. *Statistika Tanpa Stress*. TransMedia Pustaka: Jakarta.
- Akman, Baizatul., A.H, Sapha.D., 2018.Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, III (4).
- Ambarwati, Annisa. D dkk.,2021. Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI Rate dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2018). *Warmadewa Economic Development Journal*. IV (1).
- Anitasari, Merri dan Soleh, Ahmad.,2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. III(II).
- Argiya, Mita, V.S.P.,2013. Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. II (2).
- Arsyad, L.,2004. *Ekonomi Pembangunan (4th ed.)*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Asnawi dan Fitria, Hafizatul.,2018. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*. VII (1).
- Azwar.,2016. Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*. XX (2).

- Basri, Y, Z dan Mulyadi, Subri.,2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Raja Grafindo Pesada: Jakarta.
- Boediono.,2014. *Ekonomi Moneter*. BPFE: Yogyakarta.
- Charisma, Yosafat dan Brata, Gunadi A., 2016. Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014.*E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Djojohadikusumo, Sumitro.,1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan, Edisi Pertama*. Pustaka LP3ES: Jakarta.
- Fadilla, Amir S dan Purnamasari, Anggun.,2021. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. VII(I).
- Fajar, M dan Azhar, Zul.,2018. Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara. *EcoGen*. I(III).
- Falianty, Telisa A.,2019. *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers: Depok.
- Grundler, Klous dan Potrafke, Niklas.,2019. Corruption and Economic Growth: New Empirical Evidence. *Ifo Working Paper*.No.309.
- Gujarati, Damodar.,2003. *Ekonometrika Dasar*: Edisi Keenam. Erlangga: Jakarta.
- Hidayat, Avicenna.S dan Nalle, Frederic.W.,2017. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. XV (1).
- Hyman, David.N.,1992. *Public Finance*. Dryden Press: London.
- Ichvani, Lutfiana F dan Sasana Hadi.,2019. Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. IV (I).
- Indriyani, Siwi N.,2016. Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bungan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*.
- Isgiyata, Jaka dkk.,2018. Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*. V (1).
- Kennedy, Posma S J.,2017. Hubungan Persepsi Korupsi, Daya Saing, dan Kemudahan Berusaha Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Analisa Data Dari Survei Persepsi

- Korupsi). *Ikraith-Humaniora*. I (2).
- Kistianingsih, Dwi.,2019. Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Investasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2000-2017. Surakarta: Moneter.
- Klitgaard, Robert.,2001. *Membasmi Korupsi, Ed 2, Cet 2*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- KunCoro, Mudrajad.,2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Ke-3*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Leff, N.,1964. Economic Development Through Breaucratic Corruption. *American Behavioral Scientist*, VIII (3).
- Lestari, Yeni S.,2017. Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang. *Cummunit*. III(II).
- Luthfi, A.F., Zainuri & Diartho, H.C.,2020. Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, VII (1).
- Mankiw N, Gregory dkk (2013). *Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N.G.,2003. *Teori Makroekonomi, Edisi ke-4*. Erlangga: Jakarta.
- Maulid, Cesarina L dk.,2021. The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*. I(I).
- Mauro, P.,1995. Corruption and Growth.*The Quarterly Journal of Economics*, 110(3).
- Nawatmi, Sri.,2013. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi-Studi Empiris 33 Provinsi di Indonesia.*Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. II (1).
- Nawatmi, Sri., 2016. Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi – Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik. *Media Ekonomi dan Manajemen*. 31 (1).
- Pakpahan, A dkk.,2013. Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia. *Jurnal Pertahanan*. III (1).
- Pustha, Fabianus W.,2021. Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasa Korupsi. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. II (2).
- Rintuh, Cornelis dan Miara (2005). *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*.BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta
- Sasana, Hadi.,2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.
- Sugito (2021). *Ekonomi Politik & Pembangunan*. El-Markazi: Bengkulu.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers: Jakarta.
- Tapsin.,2014. An Analysis Of Household Consumption Expenditures In EA-18. *European Scientific Journal*. X (16).
- Tegegne, Yeshiwas.E.,2021. Impact of Broad Money Supply on Economic Growth of Ethiopia. *Research Journal of Finance and Accounting*. XII (5).
- Thach, Ngich T dkk.,2017. Effect of Corruption on Economic Growth-Empirical Study of Asia Countries. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*. III (7).
- Todaro, P., & Smith, S. C.,2006. *Pembangunan Ekonomi (Terjemahan dari Economic Development)*. (H. Munandar & D. Barnadi, Eds.) (Sembilan). Erlangga: Jakarta.
- Utami, Siti.R dan Suryaningsih, Rosita.,2011. Analisis Pengaruh Narrow Money dan Broad Money (M2) Terhadap Laju Inflasi di Indonesia. *Ultima Accounting*. III (1).
- Waluyo, Joko.,2010. Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara.*Buletin Ekonomi*.VIII (2).
- Winarno, Wing Wahyu.,2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eview*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wu, S dkk.,2010. The Impact of Government Expenditure on Economic Growth: How Sensitive to The Level of Development? *Journal of Policy Modeling*, 32..
- Yudistira, I.B dan Jember, I.M.,2015. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.*E-Jurnal EP Unud*. IV (2).
- Yuliadi, Immamudin.,2008. *Ekonomi Meoneter*. PT.Indeks: Jakarta.
- Yunani, Zuhairan Y dan Andini, Ayu.,2018. Korupsi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kausalitas Antar Negara Asean). *Jejak: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*. XI (2).
- Zahari, M.,2017. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* I(I).
- <https://data.worldbank.org/> (Diakses pada 7 Mei 2022)
- <https://jurnal.bpk.kemenkeu.go.id> (Diakses pada 10 Januari 2022)
- <https://jurnal.kpk.go.id> (Diakses pada 10 Januari 2022)
- <https://kppu.go.id> (Diakses pada 16 Februari 2022)
- <https://www.transparency.org/en/cpi/2012> (Diakses pada 7 Mei 2021).